

KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 12 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK** : - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.
- Dasar hukum: UUD tahun 1945; UU Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; dan Perda Kab. Klungkung No. 3 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Tata Cara Penagihan;
 11. Kedaluwarsa Penagihan;
 12. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
 13. Masa Retribusi;
 14. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya;
 15. Ketentuan Penyidikan;
 16. Ketentuan Pidana; dan
 17. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 18 Oktober 2013